

Gerakan Filantropi Pendidikan Dompot Dhuafa Tahun 1999-2011

Imam Basthomi^a

imambasthomi@mail.ugm.ac.id

^aUniversitas Gadjah Mada

ARTICLE INFO

Received: 17th September 2024

Revised: 07th December 2024

Accepted: 15th December 2024

Published: 30th December 2024

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.51190/jazirah.v5i02.168>



This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,
Online ISSN: 2774-3144

ABSTRAK

Salah satu topik yang menarik untuk dibahas di Indonesia adalah mengenai Filantropi Islam. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar memiliki banyak lembaga filantropi Islam. Lembaga filantropi Islam memiliki peran dalam mensejahterakan umat, termasuk dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, tetapi harus ada beberapa pihak yang bekerja sama. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga filantropi Islam di Indonesia dapat berkontribusi dalam bidang pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan deskriptif. Metode pengumpulan data dan cara menganalisis menggunakan metode sejarah (heuristik, kritik, interpretasi, historiografi). Penelitian ini menemukan bahwa Dompot Dhuafa memiliki peran vital dalam bidang pendidikan. Dompot Dhuafa dalam bidang pendidikan, memberdayakan dana filantropi untuk pemberian beasiswa dan pendirian lembaga pendidikan serta pengembangan mutu pendidikan.

KATA KUNCI

Filantropi Islam, Pendidikan, dan Dompot Dhuafa

ABSTRACT

One of attractive topic to discuss in Indonesia is about Islamic Philanthropy. Indonesia as a country that has a large number of Muslims has many Islamic philanthropic institutions. Islamic Philanthropic institution has a role to prospers the people, including in education sectors. The Quality of education cannot be achieved with one party alone but there must be several parties working together. This study explores how Dompot Dhuafa as one of Islamic Philanthropic in Indonesia can contribute on education. This research was conducted by using qualitative approaches with descriptive explanation. Methods of collecting data and how to analyze use historical method (heuristic, critics, interpretation, historiography). This study found that Dompot Dhuafa has a vital role in education. Dompot Dhuafa in the field of education, empowers philanthropic funds for the provision of scholarships and the establishment of educational institutions as well as the development of educational quality.

KEYWORDS

Islamic Philanthropy, Education, and Dompot Dhuafa.

PENDAHULUAN

Sebagian orang memandang pendidikan adalah kunci kemajuan dan perubahan. Pendidikan dapat dianggap sebagai proses menjadi manusia yang manusiawi dan merdeka dalam dimensi kemanusiaan untuk bermanfaat bagi orang lain.¹ Dari pengertian tersebut menurut hemat penulis pendidikan bisa dikatakan sebagai sebuah proses belajar-mengajar. Dalam prosesnya pendidikan tidak melulu mencakup dunia persekolahan saja, namun di dalamnya juga ada kompleksitas problematika yang menarik untuk dikaji lebih jauh.

Pendidikan memang sangat penting untuk kemajuan peradaban manusia. Pada setiap kurun waktu, pendidikan selalu mengalami perkembangan. Setiap periode perkembangannya mempunyai dinamika yang berbeda-beda. Yang menjadi menarik adalah adanya peran yang signifikan dari masyarakat sipil dalam memajukan pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh gerakan-gerakan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, serta munculnya tokoh-tokoh pendidikan seperti RA. Kartini, Ki Hadjar Dewantara, dan Mohammad Syafei pada awal tahun 1900-an.²

Beberapa gerakan di bidang pendidikan yang diinisiasi oleh masyarakat sipil tersebut dapat berkembang lebih jauh dengan adanya praktik-praktik filantropi Islam. Hal tersebut muncul bersamaan dengan kedatangan agama Islam di Nusantara. Banyak aspek yang telah diuntungkan dengan hadirnya filantropi Islam. Salah satunya berkaitan dengan pendidikan. Menurut Hilman Latief, peran filantropi Islam memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan penyebaran lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, sekolah, dan universitas di Indonesia.³ Dalam konteks pendirian lembaga pendidikan, bentuk filantropi Islam yang sering muncul adalah berupa wakaf. Namun dalam perkembangannya, filantropi Islam tidak hanya berupa wakaf saja, melainkan dalam bidang Pendidikan juga.

¹ Agus Suwignyo, *Pendidikan Tinggi & Goncangan Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4-5.

² Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 99-113.

³ Hilman Latief, "Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Pendidikan Islam* 28, no. 1 (2013).

Dalam bidang pendidikan, filantropi Islam semakin berkembang dengan munculnya lembaga filantropi Islam yang menggunakan sistem penggalangan dana dan manajemen yang lebih canggih. Dengan demikian, filantropi dalam bidang pendidikan tidak hanya berpusat pada penyediaan infrastruktur lagi, tetapi juga pada kemampuan atau kompetensi guru dan siswa. Dompet Dhuafa adalah salah satu lembaga filantropi Islam yang menjadi pionir dalam pengembangan filantropi pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dan dana sosial lainnya, Dompet Dhuafa merupakan lembaga amal dan kemanusiaan yang bekerja untuk membantu orang miskin dan duafa. Melalui inisiatif filantropis dan wirausaha sosial profetik, lembaga ini menerapkan pendekatan budaya untuk melaksanakan program pemberdayaan.⁴

Melalui bidang pendidikannya, Dompet Dhuafa menyediakan berbagai akses pendidikan seluas-luasnya untuk kaum duafa. Beberapa contoh program pendidikannya adalah memberikan beasiswa, membangun sarana-prasarana pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan masih banyak lagi. Setiap program pendidikan yang dimiliki oleh Dompet Dhuafa memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada sejarah dan kontribusi Dompet Dhuafa dalam bidang pendidikan di Indonesia. Untuk batasan tahun penelitiannya dibatasi dari tahun 1999-2011. Tahun 1999 dipilih karena pada tahun ini Undang-undang Pengelolaan Zakat mulai diterbitkan sementara tahun 2011 dipilih karena pada tahun ini terbit Undang-undang amandemennya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) apa saja lembaga filantropi Islam yang ada di Indonesia?, (b) bagaimana latar belakang berdirinya Dompet Dhuafa?, dan (c) bagaimana kontribusi Dompet Dhuafa dalam bidang pendidikan di Indonesia pada tahun 1999-2011?. Penelitian mempunyai tujuan untuk memaparkan lembaga-lembaga filantropi Islam yang ada di Indonesia dan menganalisis sejarah serta kontribusi Dompet Dhuafa dalam bidang pendidikan.

⁴ Dompet Dhuafa, "Dompet Dhuafa," *Profil*, 2019, accessed April 4, 2020, <http://www.dompetdhuafa.org/id/tentangkami>.

METODE

Artikel ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Objek penelitian ini adalah Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga filantropi Islam di Indonesia. Penelitian ini berfokus kepada program-program Dompot Dhuafa dalam bidang pendidikan. Metode yang dipakai adalah metode sejarah yang di dalamnya meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.⁵ Pada tahapan heuristik, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi pustaka. Sumber data terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah arsip dan dokumen-dokumen dari Dompot Dhuafa sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah karya-karya ilmiah yang berupa buku, skripsi, tesis, dan artikel-artikel ilmiah lainnya.

Langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi dengan mereduksi data yang sudah terkumpul. Data dipilih yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Setelah itu masuk ke tahap interpretasi dengan menganalisis data yang ada dengan menerapkan teori Struktural Fungsionalisme milik Talcott Parsons. Tahapan terakhir adalah melakukan historiografi. Historiografi merupakan upaya merekonstruksi peristiwa di masa lampau dari suatu hasil penelitian dengan wujud sebuah tulisan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lembaga Filantropi Islam di Indonesia

Kata filantropi saat ini semakin ramai digunakan baik oleh para akademisi maupun para pegiat sosial. Namun pada faktanya kata tersebut juga masih banyak belum dipahami secara detail oleh masyarakat awam. Kendati demikian, sebenarnya kegiatan-kegiatan filantropi tidak bisa lepas dari masyarakat. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, filantropi bisa diberi makna kedermawanan atau cinta kasih terhadap sesama.⁷ Kata filantropi mirip

⁵ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 54.

⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, V. (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018).

dengan kata “Charity” dalam bahasa Inggris yang memiliki makna yang sama juga. Meminjam terminologi Amelia Fauzia, filantropi secara sederhana adalah semua kegiatan pemberian yang dilakukan secara sukarela yang dilakukan baik secara individu ataupun kelompok baik berupa barang atau jasa.⁸

Secara sederhana, aktivitas filantropi adalah kegiatan-kegiatan berderma seperti memberi donasi, zakat, wakaf, sedekah, gotong royong, dan segala bentuk kegiatan sukarelawan lainnya.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa filantropi adalah semua aktivitas kedermawanan yang dilakukan oleh manusia. Mengenai asal atau sumber dari aktivitas filantropi ada dua macam. Yang pertama berasal dari rasa kemanusiaan itu sendiri dan yang kedua berasal dari dorongan kepercayaan atau agama. Semua agama yang di Indonesia, termasuk Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu, mengajarkan penganutnya untuk menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan secara terus menerus kepada sesama.¹⁰

Dalam agama Islam, Filantropi merupakan istilah baru, namun praktik-praktiknya sudah ada sejak Islam lahir. Praktik filantropi Islam di Indonesia sudah dapat dilacak sejak zaman kerajaan Islam di Nusantara. Hal itu juga berlanjut pada zaman kolonial dan kemerdekaan namun pergerakannya belum masif dan terkesan bersifat karitas saja. Pada masa Orde Baru, lembaga filantropi baru mulai muncul dan pemerintah mulai memperhatikan pengelolaan dana filantropi Islam. Akibatnya, lembaga filantropi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) muncul sebagai hasil dari Peraturan Menteri Agama No. 4/Juli/1968 mengenai pendirian Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5/Oktober/1968.¹¹ Hal ini juga didukung oleh keputusan Presiden Suharto, yang didokumentasikan dalam Keppres No. 07/PRIN/10/1998, untuk

⁸ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia* (Gading, 2016).

⁹ Imam Basthomi, “Filantropi Islam Dan Dunia Pendidikan Di Indonesia (1999-2011)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021).

¹⁰ Ahmad Gaus AF, *Filantropi Dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 2.

¹¹ Yusuf Wibisono, *Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 39.

membentuk lembaga penghimpun zakat. Hasilnya, Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS), yang didirikan oleh pemerintah, mulai muncul di beberapa provinsi dengan nama yang berbeda-beda.¹²

BAZIS yang menyebar di wilayah daerah semakin kuat setelah adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 29 tahun 1991 tentang pengelolaan BAZIS. Presiden Suharto pada masa ini juga mendirikan lembaga filantropi berupa yayasan. Yayasan tersebut antara lain adalah Dana Abadi Karya Bakti (DAKAB), Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP), Yayasan Dharma Bakti Sosial (DHARMAIS), dan Yayasan Supersemar. Suharto mendirikan yayasan itu dengan tujuan mendukung kegiatan masyarakat dalam bidang sosial dan keagamaan.¹³

Lembaga filantropi yang didirikan oleh pemerintah saat ini menggunakan sistem pengelolaan *top-down*, yang menyebabkan banyak orang tidak setuju. Salah satu contoh penolakannya adalah dengan mendirikan organisasi zakat berbasis komunitas, yang banyak dilakukan oleh kaum Muslim modernis. Akhirnya, lembaga amil zakat jenis baru yang didirikan oleh masyarakat sipil dan korporasi mulai bermunculan. Pada sektor bisnis, ada Badan Usaha Milik Negara seperti BAMUIS dan BNI, sedangkan sektor masyarakat sipil ada Yayasan Dana Sosial Al-Falah dan Dompot Dhuafa Republika.¹⁴

Lembaga filantropi Islam bentukan non pemerintah dengan sistem pengelolaan yang modern terus meningkat secara drastis pada masa Reformasi. Tepatnya setelah lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. UU tersebut mewariskan tiga hal pokok, yaitu: Menjadi sebuah landasan atau payung hukum pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ), penafsiran modern dalam sistem pengelolaan zakat, dan menjadi dasar negara untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan filantropi Islam. Pasal 6 dan 7 pada UU tersebut menjelaskan bahwa organisasi atau lembaga yang mengurus zakat adalah

¹² Makhrus, "Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat Dan Institusionalisasi Filantropi Islam Di Indonesia," *Islamadina* 3, no. 2 (2014): 36.

¹³ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam Di Indonesia Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Ombak, 2017), 95.

¹⁴ Latief, *Politik Filantropi Islam Di Indonesia Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*.

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ berasal dari pemerintah sedangkan LAZ dari masyarakat sipil.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menandai tonggak baru dalam dunia filantropi di Indonesia. Beberapa pihak menggunakan UU tersebut sebagai dasar untuk mendirikan lembaga filantropi Islam, terutama LAZ, yang biasanya didirikan secara independen dan didanai sepenuhnya dari zakat dan dana sosial lainnya. LAZ dapat dikelompokkan dalam lima kategori, yakni LAZ umum (tidak punya afiliasi), LAZ berbasis ormas, LAZ dari korporasi, LAZ dari institusi keagamaan, dan LAZ dari partai politik.¹⁵

Hadirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, benar-benar membantu para pegiat filantropi. Namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar memberikan pelayanan dan hasil yang optimal. Hal yang harus dibenahi adalah mengenai transparansi, sistem kelola, akuntabilitas, sinergi lembaga, dan hubungan zakat dengan pajak. DPR mengesahkan UU Pengelolaan Zakat Baru No. 23/2011 pada Oktober 2011, setelah beberapa kali dibahas untuk mengubahnya. Sistem pengelolaan lembaga zakat Indonesia, yang sebelumnya berbasis desentralisasi, telah diubah menjadi sentralisasi sebagai akibat dari undang-undang baru ini. Sementara LAZ hanya berfungsi sebagai pembantu dan diperketat dalam proses perizinannya, pemerintah mengelola zakat nasional melalui Baznas.¹⁶

Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Filantropi Islam

Dompot Dhuafa (juga disebut DD) adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada upaya filantropi Islam. DD memiliki sistem pengelolaan kontemporer, yang menjadikannya salah satu lembaga filantropi modern pertama di Indonesia. DD adalah lembaga filantropi Islam modern yang berfokus pada pelayanan sosial, pemberdayaan, dan program kemanusiaan. DD bermula dari rasa empati kolektif yang dimiliki oleh komunitas jurnalis saat mereka sering berinteraksi

¹⁵ Wibisono, *Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, 187-197.

¹⁶ Forum Zakat, *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca UU NO. 23/2011* (Jakarta: Prenada, 2020).

dengan masyarakat yang mampu dan masyarakat duafa. Harian Umum Republika mengadakan promosi di stadion Kridosono Yogyakarta pada April 1993. Setelah promosi, rombongan Republika yang terdiri dari raja dangdut Rhoma Irama, alm. ustaz Zainuddin MZ, dan Corps Dakwah Pedesaan (CDP), dipimpin oleh alm. Umar Sanusi, serta binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, alm. bapak Jalal Mukhsin, diundang untuk makan di restoran Bambu Kuning. Dari pertemuan dan diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut akhirnya menginspirasi untuk melahirkan Dompot Dhuafa.¹⁷

Rubrik "Dompot Dhuafa" dibuka oleh Harian Umum Republika pada 2 Juli 1993, sontak mengundang pembaca untuk bergabung dengan inisiatif Harian Umum Republika untuk membantu orang lain. Tanggal tersebut menjadi hari lahir Dompot Dhuafa Republika. Mendapat dukungan positif dari masyarakat, Yayasan Dompot Dhuafa akhirnya resmi didirikan pada tanggal 4 September 1994 oleh empat pendiri: Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo.¹⁸

DD telah didaftarkan sebagai yayasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tanggal 14 September 1994, yayasan didirikan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH., dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Pada 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 untuk mengakui Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat Tingkat Nasional (LAZNAS) sebagai hasil dari kerja keras dan profesionalisme DD dalam menjalankan programnya.¹⁹

Sebagai lembaga filantropi, DD berubah menjadi lembaga kemanusiaan. Faktor internal dan eksternal memengaruhinya. Faktor internal termasuk semangat Islam dan sumber daya manusia yang tinggi, kemajuan dalam struktur dan program, dan dukungan donatur. Munculnya peraturan tentang lembaga zakat dan adanya bencana alam yang melanda masyarakat Indonesia adalah

¹⁷ Dompot Dhuafa, "Dompot Dhuafa."

¹⁸ Bakti Nusa, *Youlead* (Bogor: Dompot Dhuafa, 2019), 4.

¹⁹ Dompot Dhuafa Yogyakarta, "Dompot Dhuafa Yogyakarta," *Sejarah*, 2019, accessed March 15, 2021, <https://jogja.dompotdhuafa.org/sejarah/>.

faktor eksternal.²⁰ Sebagai sebuah lembaga tentunya DD juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi DD tertinggi adalah dewan pembina, yang diikuti oleh dewan pengawas, dewan syariah, dan dewan pengurus. Beberapa komite dan direktorat berada di bawah dewan pengurus. DD sendiri berhasil membuka banyak cabang di dalam dan di luar negeri, menjadikannya salah satu LAZNAS terbesar di Indonesia. Ini juga mencakup pembukaan zona layanan di setiap wilayahnya. Setiap cabang menjalankan program mereka sendiri, tetapi mereka tetap berkolaborasi dengan DD pusat.

Secara umum DD mempunyai program-program yang bergerak pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-dakwah, dan budaya. Dalam mengembangkan program, DD senantiasa mengacu kepada tiga hal, yakni: dimensi ZISWAF, dimensi ekonomi Islam, dan dimensi kepedulian sosial.²¹ Ketiganya dijadikan terus dikembangkan agar DD bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari ketiganya menghasilkan program-program filantropis yang berasal dana-dana yang dikelola secara profesional. Dana-dana tersebut didapatkan dengan sistem fundraising modern, profesional, dan memanfaatkan teknologi kekinian. Penggalangan dana di DD merupakan tugas Corporate Marketing, Retail, dan Resources Mobilization (REMO) yang berada dibawah Direktorat Penghimpunan.²²

Kontribusi Dompot Dhuafa dalam Bidang Pendidikan di Indonesia tahun 1999-2011

Banyak organisasi filantropi Islam berdiri di Indonesia saat ini. Organisasi tersebut mengelola dana filantropi untuk kepentingan umum, khususnya untuk kaum duafa. Selain itu, programnya telah diterapkan ke berbagai bidang, termasuk dalam hal pendidikan. Sebagai salah satu lembaga filantropi Islam

²⁰ Ali Nurdin, "Transformasi Dompot Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan," *Buletin Al-Turas* 19, no. 2 (2018): 351-364.

²¹ Idris Thaha, *Berderma Untuk Semua Wacana Dan Praktik Filantropi Islam* (Jakarta Selatan: Teraju, 2003).

²² N. Oneng Nurul Bariyah, "Strategi Penghimpunan Dana Sosial Ummat Pada Lembaga Filantropi Di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat, Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, Dan BAZIS DKI Jakarta)," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 26-29.

pertama di Indonesia, Dompot Dhuafa (DD) juga berkontribusi banyak dalam pendidikan. Menurut teori fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, empat kondisi harus dipenuhi sebelum sistem dapat dianggap fungsional. Ada *Adaptation*, *Goal attainment*, *Integration*, dan *Latency* (AGIL).²³ Berdasarkan teori ini, DD dalam bidang filantropi pendidikan dapat dianggap memiliki sistem yang fungsional. Dalam Adaptasi, DD memiliki program kegiatan dan manajemen untuk menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Adanya visi dan misi dapat menunjukkan pencapaian tujuan (*goal attainment*). *Integration* ditunjukkan dalam hal adanya kerja sama atau kolaborasi dengan lembaga lain. *Latency* ditandai dengan adanya pengembangan dalam setiap program.

Peneliti membagi dua periodisasi untuk menjelaskan kontribusi DD dalam membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Yang pertama pada tahun sebelum keluarnya UU pengelolaan zakat dan yang kedua pada tahun setelah keluarnya UU pengelolaan zakat tahun 1999. Untuk tahun setelah keluarnya UU pengelolaan zakat, peneliti membatasinya hingga tahun 2011. Hal itu karena pada tahun itu telah ditetapkannya amandemen UU pengelolaan zakat.

Sebelum Keluarnya UU Pengelolaan Zakat

Mencerdaskan rakyat adalah tugas pemerintah Indonesia, menurut UUD 1945. Pada era Orde Baru, pendidikan adalah bagian penting dari rencana pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan pendidikan wajib selama enam dan sembilan tahun. Pemerintah, orang tua, dan masyarakat bertanggung jawab atas program tersebut. Sekolah dapat didirikan dan dibangun oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang.²⁴ Satuan pendidikan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sipil mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pendidikan Nasional. Berdasarkan hal tersebut DD yang merupakan lembaga filantropi Islam juga bisa memiliki peran nyata dalam dunia pendidikan.

²³ George Ritzer, *Teori Sosiologi-Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 257.

²⁴ Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, 235.

DD pada periode di mana UU pengelolaan zakat belum keluar sebenarnya sudah menyalurkan dana filantropi ke dalam program pendidikan. Berdasarkan data yang diunggah di <https://publikasi.dompetchuafa.org/laporan-data-kinerja/>, DD sejak tahun 1999 sudah memiliki 1000 orang penerima manfaat program pendidikan. Namun dalam data itu belum ditampilkan secara detail jenis atau bentuk programnya. DD mulai mengembangkan program pendidikannya secara masif setelah mendirikan Lembaga Pengembangan Insani pada tahun 2003. Untuk lembaga filantropi Islam lainnya pada masa ini masih banyak yang masih bersifat karitas saja.

Sesudah Lahirnya UU Pengelolaan Zakat

Lembaga filantropi Islam berkembang pesat sejak adanya UU Pengelolaan Zakat tahun 1999. Selain itu, peningkatan ini didukung oleh sistem yang lebih canggih untuk mengelola lembaga dan mengelola pengelolaan dana filantropis. Salah satunya dialokasikan dalam bidang di pendidikan. Organisasi filantropi Islam dapat membantu pemerintah dalam memajukan pendidikan. Program pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia diatur oleh pemerintah Indonesia dalam program wajib belajar. Program tersebut masih menghadapi masalah atau hambatan. Beberapa penyebabnya termasuk kurangnya dukungan masyarakat terhadap pendidikan; kurangnya sarana dan prasarana pendidikan; lokasi geografis yang sulit dijangkau; kurangnya dedikasi guru dan sumber daya; dan keyakinan masyarakat bahwa pendidikan tidak penting.²⁵

Salah satu upaya DD dalam membantu pemerintah menyelenggarakan program wajib belajar adalah dengan mendirikan Lembaga Pengembangan Insani. Dalam lembaga tersebut DD membangun Sekolah Menengah Akselerasi Internat (Smart) Ekselensia Indonesia. Sekolah tersebut didedikasikan untuk anak-anak duafa berprestasi dari seluruh Indonesia. Pendirian sekolah ini dilatarbelakangi adanya angka putus sekolah yang tinggi di kalangan kaum

²⁵ Nurul Ulfatin, Amat Mukhadis, and Ali Imron, "Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif Penuntasannya," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 17, no. 1 (2010).

dua. Smart Ekselensia Indonesia berlokasi di Jalan Raya Parung KM 42 Kab. Bogor, Jawa Barat dan mulai dirilis sejak Bulan Oktober 2003 dan telah diresmikan pada tanggal 29 Juli 2004.²⁶

SMART Ekselensia Indonesia merupakan sekolah berbasis asrama, bebas biaya, dan berakselerasi untuk SMP dan SMA selama 5 tahun. Sekolah ini memadukan sistem sekolah dengan sistem asrama dan berlaku khusus untuk anak laki-laki yang memiliki kendala finansial. SMART Ekselensia Indonesia pada tahun 2011 telah mendidik angkatan ke-7 dengan jumlah total siswa 175 dan menjangkau sampai 24 provinsi di Indonesia.

DD juga membuat berbagai jenis program-program beasiswa untuk membantu masyarakat untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Program tersebut termuat dalam Beastudi Indonesia (BI) yang merupakan jejaring pendidikan DD yang berfokus dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain memberikan beasiswa pendidikan, BI juga melaksanakan pembinaan karakter, pemberdayaan, dan pendampingan. Tujuan BI adalah untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter, kompetensi unggul, dan dapat menjadikan Indonesia berdaya. BI berdiri sejak tahun 2003 sebagai wadah dari berbagai beasiswa yang telah digulirkan oleh DD dari awal berdirinya.²⁷

Program BI yang dimiliki DD antara lain sebagai berikut:

a. Beastudi SLTA

Beasiswa yang memberikan bantuan biaya pendidikan setiap bulan dengan memberikan bekal keagamaan dan pembinaan serta pengembangan diri. Program ini berlangsung dari Bulan Januari hingga bulan Juni 2003.

b. Beastudi Leadership dan entrepreneurship

Beasiswa yang memberikan pembinaan secara intensif terhadap para mahasiswa yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Para penerima beasiswa ini harus tinggal dalam asrama dan selalu diajak untuk berkiprah di masyarakat. Program ini berlangsung bulan Juni-Desember 2003.

²⁶ Dompot Dhuafa, "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2003," 2004, <https://publikasi.dompetdhuafa.org/laporan-publik-tahunan/>.

²⁷ Dompot Dhuafa, "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2012," 2013, <https://publikasi.dompetdhuafa.org/laporan-publik-tahunan/>.

c. Beastudi Cerdik

Beasiswa yang memberikan tunjangan dana untuk menyelesaikan tugas-tugas dan aktivitas yang terkait dengan bidang keilmuan para mahasiswa. Para mahasiswa juga diberikan pembinaan intensif untuk mengoptimalkan keahliannya. Program ini berlangsung bulan Juni-Desember 2003.

d. Beastudi Etos

Program beasiswa ini ditujukan untuk para peserta didik dari keluarga yang kurang mampu. Beastudi Etos memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbakat dan berprestasi namun memiliki kendala dalam hal biaya pendidikan. Program beasiswa ini memberikan biaya bantuan pendidikan setiap bulan dengan pembinaan terstruktur di asrama dan melibatkan para penerima beasiswa dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Sampai tahun 2009, Beastudi Etos telah menjaring dan memberikan beasiswa kepada 644 mahasiswa unggul di 11 universitas terkemuka di Indonesia dengan aneka latar belakang program studi. Dengan adanya program pendampingan yang rutin, para penerima Beasiswa Etos telah mencetak prestasi baik akademik maupun non-akademik.

e. Bea Guru

Beasiswa ini berupa pemberian pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru pada tingkat Sekolah Dasar (SD) ataupun Madrasah Ibtidaiyah (MI).

f. Beastudi Aktivistis Nusantara (BAKTI NUSA)

BAKTI NUSA adalah Program beasiswa berupa pengembangan kepemimpinan bagi aktivis mahasiswa. Program ini bertujuan untuk membentuk pemimpin-pemimpin berintegritas, cendekia, transformatif, dan siap melayani masyarakat demi terwujudnya Indonesia berdaya. BAKTI NUSA telah mencakup hingga 14 kampus ternama di Indonesia, yaitu: UNAND,

UNSRI, UI, IPB, ITB, UNPAD, UGM, UNS, ITS, UNAIR, UNDIP, UB, UNSOED, dan USU.²⁸

Selain mengadakan program beasiswa, DD pada tahun 2003 juga mengadakan penajakan pelaksanaan Training Keterampilan Aplikatif dan kegiatan Peduli Sosial Remaja. Di program pertama, DD mencoba mendesain pelatihan aplikatif untuk kaum duafa. Di program kedua DD menginisiasi kegiatan pelatihan dan sosial di sekolah-sekolah. Di tahun 2004, DD mendirikan Makmal Pendidikan yang berupa laboratorium pendidikan yang berfokus pada pengembangan dan inovasi pendidikan.

Makmal Pendidikan berfokus pada pengembangan pendidikan melalui riset, advokasi, konsultasi, pelatihan, pendampingan, pengembangan data dan pengetahuan. Makmal Pendidikan juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dmelalui pelatihan guru dari seluruh tanah air. Sampai tahun 2009 telah terlatih lebih dari 8.000 guru dari 2.652 sekolah di 18 provinsi. Selain itu, ada 15 sekolah marjinal di 6 wilayah telah mendapatkan pendampingan sistem pendidikan melalui Makmal Pendidikan.²⁹

Untuk membantu Makmal Pendidikan, DD mendirikan program Sekolah Guru Ekselensia Indonesia (SGEI). Program itu didirikan pada tanggal 24 Oktober 2009 dengan tujuan program untuk meningkatkan kompetensi, membentuk pribadi cerdas, dan mendidik para peserta untuk siap mengabdikan menjadi guru. SGI didirikan untuk pemuda Indonesia yang siap mengabdikan diri menjadi guru, serta berkomitmen untuk melahirkan guru yang memiliki kompetensi dalam mengajar, mendidik, memimpin.

Para peserta yang mengikuti program SGI memiliki dua kompetensi, yakni kompetensi umum (keterampilan pembelajaran, karakter pendidik dan kepemimpinan) dan khusus (kemampuan menulis opini, berita, dan feature). Untuk ikut program ini ada beberapa tahapan seleksi yang harus diikuti. Peserta program yang dapat ikut tahap seleksi adalah para guru yang sudah mengajar di sekolah dan calon guru yang berasal dari universitas ternama non

²⁸ Dompot Dhuafa, "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2020," 2021, <https://publikasi.dompotdhuafa.org/laporan-publik-tahunan/>.

²⁹ Dompot Dhuafa, "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2012."

kependidikan yang berminat menjadi guru dengan IPK di atas 2,75 dan berusia maksimal 25 tahun.³⁰

DD juga mendirikan Institut Kemandirian (IK). Ik merupakan program yang berupaya merubah status mustahik zakat menjadi muzaki. IK didirikan pada 23 Mei 2005 dengan tujuan mengatasi pengangguran dan kemiskinan melalui pelatihan bisnis dan marketing. Program IK memberikan pelatihan keterampilan masyarakat duafa dalam usia produktif dengan keterampilan praktis untuk menciptakan lapangan kerja baru.³¹

KESIMPULAN

Filantropi Islam di Indonesia mulai ada perkembangan secara signifikan setelah lahirnya lembaga-lembaga filantropi Islam. Lahirnya UU tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 1999 menjadi landasan dasar dan tonggak awal mula berkembangnya lembaga filantropi Islam. Dompot Dhuafa yang sudah berdiri sejak masa akhir Orde baru merupakan salah satu pionir dalam dunia filantropi di Indonesia. Dompot Dhuafa menggunakan sistem kelola yang modern dan mendayagunakan dana filantropis untuk program-program pemberdayaan. Dompot Dhuafa sudah membuka cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Dompot Dhuafa memberdayakan dana-dana filantropis dalam bidang ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, dan pendidikan.

Gerakan filantropi pendidikan Dompot Dhuafa mulai berkembang pesat sejak tahun 2003. Pada tahun itu Dompot Dhuafa mendirikan Lembaga Pengembangan Insani yang berfokus pada bidang pendidikan. Melalui lembaga itu Dompot Dhuafa mendayagunakan dana filantropis untuk membuat program beasiswa, pembangunan lembaga pendidikan, dan program-program pelatihan lainnya. Semua program tersebut dikelola dengan menggunakan dana-dana filantropis dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kualifikasi mustahik zakat.

³⁰ Dompot Dhuafa, "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2011," 2012, <https://publikasi.dompotdhuafa.org/laporan-publik-tahunan/>.

³¹ Dompot Dhuafa, "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2008," 2009, <https://publikasi.dompotdhuafa.org/laporan-publik-tahunan/>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. V. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.
- Bakti Nusa. *Youlead*. Bogor: Dompot Dhuafa, 2019.
- Bariyah, N. Oneng Nurul. "Strategi Penghimpunan Dana Sosial Ummat Pada Lembaga Filantropi Di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat, Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, Dan BAZIS DKI Jakarta)." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016).
- Basthomi, Imam. "Filantropi Islam Dan Dunia Pendidikan Di Indonesia (1999-2011)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Dompot Dhuafa. "Dompot Dhuafa." *Profil*, 2019. Accessed April 4, 2020. <http://www.dompetdhuafa.org/id/tentangkami>.
- . "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2003," 2004. <https://publikasi.dompetdhuafa.org/laporan-publik-tahunan/>.
- . "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2008," 2009. <https://publikasi.dompetdhuafa.org/laporan-publik-tahunan/>.
- . "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2011," 2012. <https://publikasi.dompetdhuafa.org/laporan-publik-tahunan/>.
- . "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2012," 2013. <https://publikasi.dompetdhuafa.org/laporan-publik-tahunan/>.
- . "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2020," 2021. <https://publikasi.dompetdhuafa.org/laporan-publik-tahunan/>.
- Dompot Dhuafa Yogyakarta. "Dompot Dhuafa Yogyakarta." *Sejarah*, 2019. Accessed March 15, 2021. <https://jogja.dompetdhuafa.org/sejarah/>.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*. Gading, 2016.
- Forum Zakat. *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca UU NO. 23/2011*. Jakarta: Prenada, 2020.

- Gaus AF, Ahmad. *Filantropi Dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Latief, Hilman. "Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Pendidikan Islam* 28, no. 1 (2013).
- . *Politik Filantropi Islam Di Indonesia Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Makhrus. "Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat Dan Institusionalisasi Filantropi Islam Di Indonesia." *Islamadina* 3, no. 2 (2014).
- Nurdin, Ali. "Transformasi Dompot Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan." *Buletin Al-Turas* 19, no. 2 (2018).
- Rifa'i, Muhammad. *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi-Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Suwignyo, Agus. *Pendidikan Tinggi & Goncangan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Thaha, Idris. *Berderma Untuk Semua Wacana Dan Praktik Filantropi Islam*. Jakarta Selatan: Teraju, 2003.
- Ulfatin, Nurul, Amat Mukhadis, and Ali Imron. "Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif Penuntasannya." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 17, no. 1 (2010).
- Wibisono, Yusuf. *Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.